

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	iii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah:	14
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.3.1. Tujuan objektif	15
1.3.2. Tujuan subjektif.....	15
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.4.1. Manfaat teoritis.....	15
1.4.2. Manfaat praktis.....	16

1.5	Metode Penelitian:	16	
1.4.1.	Tipe penelitian hukum	16	
1.4.2.	Pendekatan (<i>Approach</i>).....	17	
1.4.3.	Sumber bahan hukum (<i>Legal Sources</i>).....	19	
1.4.4.	Prosedur pengumpulan bahan hukum.....	19	
1.4.5.	Analisis bahan hukum.....	20	
1.4.6.	Sistematika Penelitian.....	20	
BAB II URGENSI KETENTUAN INTERVENSI FISKAL PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.....			22
2.1	Implementasi Ketentuan Intervensi Fiskal Pemerintah Pusat terhadap Daerah dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	24	
2.2.	Konsistensi Pengaturan Kewenangan Daerah dalam Pengutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setelah berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	31	
BAB III AKIBAT INTERVENSI FISKAL PEMERINTAH PUSAT PADA PENENTUAN TARIF PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP KEWENANGAN KEPALA DAERAH.....			35
3.1	Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah	35	
3.2	Kewenangan Kepala Daerah Sebelum dan Setelah Berlakunya UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	36	
BAB IV PENUTUP.....			42

4.1	Kesimpulan	42
4.2	Saran.....	43
	DAFTAR BACAAN.....	45